

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I merupakan bagian pendahuluan dari penelitian berikut. Bab berikut akan menjabarkan beberapa bagian meliputi; Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu, kerangka konsep, metode, hipotesis serta *outline* dari keseluruhan BAB yang akan dibahas.

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1990 Republik Yaman dibentuk bersamaan dengan hasil kesepakatan penggabungan Republik Arab Yaman (YAR) dan Republik Demokratik Rakyat Yaman (PDRY). Meskipun memiliki orientasi politik yang berbeda, di mana YAR berdiri sebagai kapitalis sementara PDRY dengan sosialisnya, kedua wilayah tersebut memiliki ciri yang sama yang kemudian menjadikan Yaman sebuah bangsa. Kesamaan budaya, struktur sosial dan basis ekonomi pada sektor pertanian dan perikanan mendorong dasar penggabungan dua kawasan tersebut (Burrowes, 1992). Kala itu, Ali Abdullah Saleh yang sebelumnya merupakan Presiden Yaman Utara sejak 1978 terpilih untuk menjabat sebagai Presiden Republik Yaman. Misi penyatuan Selatan dan Utara yang dianggap sebagai komponen penting proses evolusi Yaman tersebut nyatanya menambah lapisan kompleksitas terhadap problematika yang terjadi pada pemerintahan Yaman. Hubungan Utara dan Selatan masih bersitegang, kegagalan untuk menciptakan satu dari dua negara bersama dengan fakta bahwa pemerintahan politik Yaman Utara yang terkesan keras dan korup, menyebabkan orang-orang selatan mempertimbangkan kembali unifikasi. Situasi tersebut memicu perang saudara pada tahun 1994 saat Presiden Saleh mengikutsertakan angkatan bersenjata.

Gejolak politik terus berlangsung, situasi rakyat yang frustrasi akibat dari marginalisasi politik, pencabutan hak ekonomi, negara yang ekstraktif, pemerintah yang korup dan rentier menghantui dinamika Yaman. Kegagalan sistemik tersebut telah menghasilkan siklus kekerasan, pergolakan politik hingga keruntuhan institusional. Pergolakan masyarakat mencapai puncak saat protes populer Arab

Spring 2011 menyebar ke Yaman. Di bawah tekanan domestik dan internasional, pada akhirnya Presiden Ali Abdullah Saleh berhasil mengundurkan diri dari jabatannya selama lebih dari tiga puluh tahun. Pemberontakan ini kemudian dilanjutkan pada kesepakatan politik yang ditengahi oleh PBB dan Gulf Cooperation Council (Transfeld, 2016, hal. 151-152). Melalui kesepakatan tersebut Presiden Saleh menyerahkan kekuasaannya kepada wakil presiden Abd Rabbo Mansour Hadi pada tahun 2012 dengan imbalan kekebalan.

Kesepakatan yang ditengahi PBB dan GCC tersebut juga memantau proses transisi politik dengan diadakannya Konferensi Dialog Nasional Komprehensif. Konferensi tersebut bertujuan untuk mencapai konsensus nasional yang luas tentang tatanan politik baru, konstitusi yang direvisi dan kesatuan angkatan bersenjata. Namun sejak awal rencana GCC menghadapi kesulitan. Kesepakatan transisi tersebut pada praktiknya mengucilkan pihak lain seperti Houthi, Hirak dan para pengunjuk rasa. Belum lagi kekebalan yang dimiliki Saleh tetap menjadikannya kepala partai politik terkemuka Yaman dan terus memainkan peran memecah belah dalam politik Yaman. Saleh juga masih memegang loyalitas kepada pasukan perwira militer.

Sementara itu, Presiden Hadi menghadapi tantangan lain termasuk serangan dari Houthi dan opisisi gerakan selatan. Serangan tersebut diikuti dengan gerakan memboikot pemilihan presiden tahun 2012. Inisiatif baik PBB dan GCC tersebut dianggap sebagai kesepakatan pembagian kekuasaan yang hanya memperhatikan elit politik Yaman dan mengabaikan kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara historis (Burke, 2012). Sementara itu, situasi ekonomi dan gejolak politik yang terjadi negara tidak juga membawa perubahan. Pada Juni 2014, proses transisi politik mulai berantakan. Pemerintah Hadi memutuskan untuk memotong subsidi bahan bakar yang menyebabkan kenaikan harga yang signifikan. Tindakan pemotongan subsidi tersebut memicu protes dan serangan dari Houthi beserta pendukungnya. Pada bulan september, pemberontak Houthi berhasil menduduki ibu kota, Sana'a (Ghobari, 2014).

Pengambilalihan Ibu Kota tersebut diikuti dengan paksaan agar Presiden Hadi mengundurkan diri dari jabatannya. Houthi selanjutnya mengurung Presiden

Hadi selama hampir satu bulan di Sana'a. Setelah sempat melarikan diri ke Aden, Ibu kota lama Yaman Selatan, Hadi menyatakan bahwa pengambilalihan oleh Houthi tidak sah (BBC, 2015). Eskalasi konflik mengakibatkan pembentukan koalisi pimpinan Saudi pada maret 2015 untuk mendukung Presiden Hadi. Anggota koalisi tersebut meliputi Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Maroko, Senegal, Sudan, Uni Emirat Arab dan Qatar. Koalisi mendapat dukungan dalam bentuk penjualan senjata dan pembagian intelijen dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Koalisi yang dipimpin oleh Saudi ini juga melakukan kampanye udara yang signifikan sehingga meningkatkan skala konflik (Parveen, 2019).

Eskalasi konflik yang berkepanjangan telah menempatkan setidaknya 10.000 warga Yaman tewas dalam pertempuran dengan lebih dari 40.000 korban secara keseluruhan di tahun 2018. *Save The Children* bahkan memperkirakan setidaknya 50.000 anak meninggal pada 2017. Serangan udara yang dilakukan oleh koalisi pimpinan Saudi telah menyebabkan hampir dua pertiga dari kematian warga sipil. UNOCHA juga memperkirakan bahwa lebih dari 3 juta orang Yaman telah meninggalkan rumah mereka ke tempat lain di negara tersebut. 280.000 orang dinyatakan mencari suaka ke negara lain seperti Somalia dan Djibouti. Selain kekurangan makanan dan tempat tinggal, ratusan ribu warga Yaman diketahui kesulitan dalam pemenuhan terhadap akses kesehatan. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman dicatat sebagai salah satu yang terburuk di dunia. PBB juga mengindikasikan baik Houthi maupun pasukan koalisi Hadi telah melanggar hukum humaniter internasional karena telah menyerang masyarakat sipil secara berkala. Hal ini diikuti dengan laporan bahwa telah dilakukan penyerangan di tempat ibadah, rumah sakit serta fasilitas umum lainnya (OCHA, 2021).

Dalam menanggapi gejala politik ekonomi serta krisis kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut konsultasi dan upaya dialog antar pihak yang berkonflik dilakukan. Pada April 2015, PBB menunjuk Islamil Ould Cheikh Ahmed untuk mengambil peran utama dalam memfasilitasi penyelesaian Resolusi PBB 2216. Resolusi ini mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk melanjutkan proses politik, menyerukan agar Houthi mundur tanpa syarat dari pemerintahan yang sah

dan menetapkan embargo senjata terhadap Houthi dan loyalis Saleh. Sayangnya, empat putaran negosiasi yang dijalankan terpisah dari tahun 2015 hingga 2016 tidak membuahkan hasil nyata. Puncaknya pada tahun 2018, pembicaraan damai antara pemerintah Yaman dan pemberontak berhasil mencapai kesepakatan di Swedia. Pembicaraan damai ini dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah yang diakui secara internasional yang didukung oleh koalisi militer Saudi serta Houthi yang didukung Iran. Pembicaraan bersifat informal dengan mode kelompok kerja. Pembicaraan yang dipimpin serta didukung langsung oleh PBB tersebut bertujuan untuk mengakhiri perang saudara yang hampir berlangsung selama 4 tahun di Yaman. PBB menganggap bahwa pembicaraan damai berikut merupakan tonggak penting dalam membangun kepercayaan antar pihak (TheCrisisGroup, 2019).

Setelah berlangsung kurang lebih selama satu minggu, pembicaraan damai menghasilkan *Stockholm Agreement* yang secara sah disepakati oleh kedua belah pihak yang berkonflik pada desember 2018. Perjanjian Stockholm terdiri dari tiga bagian meliputi perjanjian Hodeidah, Pengertian Taiz dan Perjanjian pertukaran tahanan. Setidaknya terdapat tiga point penting dalam perjanjian Stockholm. Pertama *ceasefire and redeployment of Forces*, para pihak berkomitmen untuk segera melakukan gencatan senjata di kota Hudaydah dan pelabuhan-pelabuhan Hudaydah, Salif dan Ras Issa. Point ini juga menekankan pemindahan pasukan militer, pengaman pelabuhan serta pembentukan Komite Koordinasi Penempatan Kembali bersama yang diketuai oleh PBB. Pada poin berikut, pihak juga sepakat untuk memberikan penguatan kehadiran PBB untuk menjalankan misi mendukung perjanjian melalui resolusi Dewan Keamanan 2452 atau dikenal dengan UNMHA (UN, 2017).

Kedua, *facilitating the movement of humanitarian aid*. Poin ini dibentuk atas dasar pembatasan yang tidak proporsional atas proses masuknya pasokan kemanusiaan dan barang bantuan yang diperlukan oleh sipil ke Yaman. Majelis Umum PBB bahkan menemukan bahwa pihak-pihak di Yaman telah memblokir bantuan kemanusiaan dan mengepung kota-kota yang terkena imbas bentrokan dari masuknya pasokan bantuan pangan. Sehingga melalui poin berikut, para pihak sepakat untuk memberikan mandat kepada ICRC (International Committee of the

Red Cross) untuk membentuk kerja teknis dalam mekanisme pengelolaan bantuan kemanusiaan ke Yaman. Ketiga, *prisoner swap*, disini pihak secara khusus bahwa masalah narapidana, tahanan dan orang hilang merupakan masalah kemanusiaan. Sehingga seluruh pihak berkomitmen untuk mengelola kembali terkait penahanan tawanan, pertukaran dan pengembalian tawanan serta misi untuk menyatukan kembali keluarga yang selama ini telah terpisah secara paksa (UN, 2017).

Perjanjian Stockholm merupakan kesempatan pertama oleh pihak-pihak yang berkonflik di Yaman. Hal ini merupakan terobosan besar dalam membangun kepercayaan pihak untuk selanjutnya menjadi pondasi proses perdamaian di Yaman (Al-Kahwati, 2019, hal. 4). Perjanjian Stockholm telah mampu membantu pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi untuk menyetujui persyaratan yang berkaitan untuk memberikan perlindungan terhadap poin-poin Hak Asasi Manusia. Pencapaian positif lain hadir ketika gencatan senjata di Hodeida berhasil berhenti selama hampir satu tahun. Akan tetapi hasil evaluasi secara keseluruhan mengatakan bahwa pencapaian perjanjian Stockholm sangat terbatas. Pelanggaran gencatan senjata terus berlanjut dan semua laporan Sekretaris Jenderal mencatat bahwa situasi kemanusiaan secara keseluruhan belum membaik. Pada awal tahun 2020 misi pemantauan secara resmi menjadi tidak berfungsi. Pada Maret 2020, seorang petugas penghubung pemerintah yang ditugaskan untuk memantau gencatan senjata di pos pengamatan gabungan ke-5 dibunuh oleh Houthi. Aksi saling serang masih terus terjadi, diketahui 116 korban telah berjatuh di tahun 2020 akibat serangan rudal yang dicurigai dilakukan oleh Houthi (Jalal, 2020).

Beberapa penelitian melaporkan bahwa perjanjian Stockholm tidak bisa membawa perdamaian keseluruhan pada Yaman. Kurang efektifnya monitoring yang dilakukan PBB, signifikansi isi perjanjian serta dinamika yang tercipta akibat campur tangan pihak luar diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan kesepakatan Stockholm berjalan lambat bahkan gagal. Selain beberapa poin yang disebutkan sebelumnya, komitmen pihak dalam mengimplementasikan perjanjian yang sangat lemah serta adanya pihak yang dengan sengaja mengingkari komitmen kesepakatan tersebut menjadi topik penting lain yang banyak diperbincangkan dalam kegagalan kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu, melalui penelitian berikut

penulis akan melakukan eksplorasi mendalam mengenai faktor yang menyebabkan mengapa kesepakatan Stockholm sulit diimplementasikan di Yaman. Analisis pada penelitian berikut selanjutnya akan difokuskan pada retorika perilaku pihak-pihak yang dengan sengaja merusak komitmen kesepakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa 2018 UN-Led Stockholm Agreement di Yaman sulit atau bahkan gagal untuk diimplementasikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan faktor yang menghambat ataupun merusak implementasi dari perjanjian UN-Led Stockholm 2018 di Yaman.

1.4 Kajian Pustaka

Tabel 1: Rangkuman Kajian Pustaka

Judul	<i>Political bargaining and violent conflict: shifting elite alliances as the decisive factor in Yemen's transformation</i>
Penulis	Maraeike Transfeld
Tahun	2016
Temuan	Dinamika yang berkembang antar aktor yang terlibat dalam konflik telah mempengaruhi tatanan politik Yaman. Pergolakan konflik semakin diperkeruh ketika elit regional dan internasional saling mengejar kepentingan.
Judul	<i>From fragile to collapsed statehood: The case of the Republic of Yemen</i>
Penulis	Jörg Michael Dostal
Tahun	2021
Temuan	Intervensi asing telah menyebabkan semakin memburuknya krisis nasional yang sudah ada sebelumnya.
Judul	<i>The main factors of Yemeni Conflict: An Analysis</i>
Penulis	Adeb Al-Tamimi dan Uddagatti Venkatesha
Tahun	2021

Temuan	Sengketa Yaman merupakan pusat perjuangan kekuatan bagi Arab Saudi dan Iran
Judul	<i>The Yemen conflict: Domestic and Regional Dynamics</i>
Penulis	Aisyan Parveen
Tahun	2019
Temuan	Disatu sisi, aktor yang terlibat dalam konflik Yaman terus berusaha untuk masuk ke dalam negosiasi perdamaian, tetapi di sisi lain pihak-pihak tersebut juga secara berkelanjutan membantu kampanye brutal kepada salah satu koalisi. Sehingga perjuangan dalam proses perdamaian selalu berkahir sia-sia.
Judul	<i>War in Yemen: No End in Sight as The State Disintegrates</i>
Penulis	Noel Brehony
Tahun	2020
Temuan	Prospek untuk penghentian konflik secara damai adalah buruk dan kemungkinan akan berlanjut di masa mendatang
Judul	<i>Watchdogs of pause: The challenges of casefire monitoring in Yemen</i>
Penulis	Júlia Palik
Tahun	2021
Temuan	Keterbatasan pengawas UNMHA terhadap kepemilikan alat untuk mengumpulkan informasi atau untuk menekan pemberontak agar menuruti permintaan tim UNMHA menjadi penyebab lambannya implementasi perjanjian Stockholm di Yaman.
Judul	<i>Yemen: Civil War and Regional Intervention</i>
Penulis	Jeremy M. Sharp
Tahun	2017
Temuan	Salah satu dari sekian banyak hambatan untuk mencapai solusi konflik Yaman adalah bahwa meskipun konflik berakar pada urusan lokal, akan tetapi hal ini telah menjadi bagian dari narasi yang lebih besar dari konfrontasi regional antara Iran dan proksinya
Judul	<i>The Hodeida Agreement that never was: Design, Implementation, and Implications on Conflict and Peace in Yemen</i>
Penulis	Ibrahim Galah Fakirah
Tahun	2020
Temuan	

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas dinamika konflik berkepanjangan di Yaman beserta upaya dan prospek perdamaian. Tulisan pertama berjudul *Political bargaining and violent conflict: shifting elite alliances as the decisive factor in Yemen's transformation* oleh Mareike Transfeld (2016) mengkaji aktor-aktor yang terlibat dalam transformasi Yaman dan dinamika yang berkembang antara aktor tersebut dalam mempengaruhi tatanan politik. Pergolakan konflik semakin diperkeruh ketika elit regional dan internasional saling mengejar kepentingan di negara tersebut dengan memberikan atau menahan siklus keuangan dan jenis dukungan lainnya. Mareike kemudian memfokuskan analisisnya pada konflik kekuasaan politik di antara elit dan implementasi inisiatif GCC yang menghubungkan dinamika kekuasaan dan proses transformasi formal. Mareike kemudian menyinggung bahwa kasus Yaman menjadi sedikit lebih menonjol di antara negara Arab Spring lainnya di mana proses transformasi diprakarsai oleh sebuah pakta yang dikenal sebagai inisiatif GCC.

Berikutnya, penelitian berjudul *From Fragile to Collapsed Statehood: The Case of the Republic of Yemen* oleh Jörg Michael Dostal (2021) memaparkan bagaimana faktor-faktor lokal, regional, dan global secara bersama-sama membuat para aktor Yaman kewalahan. Dostal juga menekankan bahwa intervensi asing telah menyebabkan semakin memburuknya krisis nasional yang sudah ada sebelumnya. Penulisnya kemudian secara rinci menjelaskan pergolakan yang setidaknya semakin agresif sejak inisiasi penyatuan Yaman. Dengan menampilkan matriks konflik, Dostal kembali memaparkan bahwa kasus Yaman dapat menjadi pelajaran dalam konteks perdebatan yang lebih besar tentang kenegaraan yang 'runtuh', 'rapuh', 'ilusi', 'terbatas', 'gagal', atau 'rusak'. Percepatan aktor regional dan global, kasus kelaparan hingga pergerakan pengungsi diyakini memperburuk bencana kemanusiaan Yaman. Penulis meyakini bahwa konflik Yaman akan sulit hilang. Aktor eksternal telah melampaui batas, telah mencoba memilih pemenang

dalam konflik domestik yang kurang dipahami, dan telah menghancurkan sebagian besar negara—daripada mengedepankan agenda berdasarkan prinsip perdamaian melalui pembangunan.

Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik Yaman, Adeb Al-Tamimi dan Uddagatti Venkatesha dalam tulisannya yang berjudul *The Main Factors of Yemeni Conflict: An Analysis* (2021) turut memaparkan secara sistematis. Penulis membagi pembahasan kedalam dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, penulis menyelidiki mulai dari faktor politik, ekonomi hingga sosial. Sentralisasi pemerintahan, sistem patronase, lemahnya sistem pemerintahan hingga tekanan keuangan menjadi beberapa aspek yang menyebabkan konflik terjadi. Sedangkan pada faktor eksternal penulis menekankan pada faktor di tingkat regional dan internasional. Di mana kepentingan geopolitik Iran, Arab Saudi, GCC, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menjadi ironi tersendiri. Penulis juga menjelaskan bagaimana Iran dan Arab Saudi memainkan peran signifikan mereka untuk mempertahankan kepentingan regional. Hingga saat ini, baik Arab Saudi maupun Iran telah menghindari konfrontasi militer secara langsung. Sebaliknya, mereka berusaha untuk mengeksploitasi ketegangan saat ini di kawasan untuk keuntungan mereka dengan perang proxy, kedua rezim berjuang untuk dominasi. Sengketa Yaman merupakan pusat perjuangan kekuatan bagi Arab Saudi dan Iran.

Terakhir, buku berjudul *The Yemen Conflict: Domestic and Regional Dynamics* oleh Aisyan Parveen (2019). Aisya memberikan gambaran bahwa konflik di Yaman dapat dilihat sebagai konflik multi-segi. Selain karena beragam isu yang mendorong pergolakan, aktor yang terlibat juga menjadi faktor inti sehingga gejolak konflik susah untuk diselesaikan. Dalam tulisannya Aisya mengatakan bahwa meskipun pemain regional dan internasional secara sinergi membujuk pihak-pihak yang bertikai untuk masuk ke dalam negosiasi perdamaian, tetapi di sisi lain pihak regional dan internasional tersebut secara berkelanjutan membantu kampanye brutal kepada salah satu koalisi. Sehingga persaingan untuk pengaruh antara dua rival regional telah menjerat Yaman ke dalam perjuangan tanpa henti.

Setelah mendapatkan gambaran mengenai dinamika konflik, tulisan-tulisan berikutnya akan memberikan gambaran mengenai prospek maupun upaya perdamaian yang telah dan saat ini tengah dijalankan oleh Yaman, termasuk mengenai 2018 UN-Led Stockholm Agreement. Diawali dengan hasil analisis oleh Noel Brehony yang berjudul *War in Yemen: No End in Sight as The State Disintegrates* (2020). Brehony membahas prospek perdamaian di Yemen dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang situasi kekuatan Houthi, keterlibatan Iran, Arab Saudi dan UEA. Dalam tulisan tersebut, Brehony memberikan argumen bahwa saat ini, prospek untuk penghentian konflik secara damai adalah buruk dan kemungkinan akan berlanjut di masa mendatang. Argumen ini kemudian dipertegas dengan fakta bahwa kesulitan dalam mengimplementasikan *Stockholm Agreement* menunjukkan bahwa tidak satu pun dari dua kombatan yang paling penting belum siap untuk membuat konsesi atau meninggalkan perang.

Analisis terkait *Stockholm Agreement* selanjutnya dijelaskan kembali lebih detail oleh Júlia Palik yang berjudul *Watchdogs of Pause: The Challenges of Ceasefire Monitoring in Yemen* (2021). Dalam studinya Palik memberikan pemahaman tentang misi pemantauan PBB dan menyoroti peluang serta kendala yang dihadapi dalam membantu pelaksanaan gencatan senjata yang merupakan salah satu poin dari 2018 UN-Led Stockholm Agreement. Dalam tulisannya Julia Palik mengatakan bahwa keterlibatan pihak dalam konflik menjadi salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kemungkinan implementasi perjanjian dan kemampuan misi pemantauan dalam konteks gencatan senjata di Yaman. Selain itu, Pengawas dalam hal ini UNMHA sering kali tidak memiliki alat untuk mengumpulkan informasi atau untuk menekan pemberontak agar menuruti permintaan tim. Sehingga tidak hanya gagal dalam melanjutkan misi gencatan senjata, berdasarkan hasil pengamatan tulisan ini juga memberikan gambaran bahwa The UN-Led Stockholm Agreement telah berjalan sangat lambat.

Kemudian dalam tulisan *Yemen: Civil War and Regional Intervention*, Jeremy M. Sharp (2017) menyikapi terkait prospek penyelesaian politik. Jeremy meyakini bahwa tampaknya salah satu dari sekian banyak hambatan untuk

mencapai solusi konflik Yaman adalah bahwa meskipun konflik berakar pada urusan lokal, akan tetapi hal ini telah menjadi bagian dari narasi yang lebih besar dari konfrontasi regional antara Iran dan proksinya. Jeremy mengamati bahwa Houthi dan koalisi yang dipimpin Saudi tampaknya tidak setuju atas kerangka kerja untuk solusi politik potensial. Meskipun gencatan senjata agak tertahan, tanpa implementasi penuh dari Perjanjian Stockholm, itu tetap lemah. Banyak pengamat tetap skeptis bahwa gencatan senjata mencerminkan dorongan yang lebih luas untuk mengakhiri perang, melihatnya sebagai sarana untuk mengurangi tekanan internasional pada pihak-pihak yang berkonflik.

Terakhir, *The Hodeida Agreement That Never Was: Design, Implementation, and Implications on Conflict and Peace in Yemen* oleh Ibrahim Galah Fakirah (2020). Studi ini memberikan gambaran mengenai jalannya kesepakatan Stockholm terutama mengenai Hodeida Agreement. Penulis menjelaskan rintangan besar dalam proses implementasi. Baik mengenai tekanan dari pihak eksternal yang berlebihan hingga pengabaian dari Houthi. Penulis juga sedikit menyinggung bahwa perjanjian ini membagi proses perdamaian Yaman dan terlalu fokus pada satu sisi sehingga ada banyak poin yang diabaikan termasuk peran *spoiler*. Artikel ini menawarkan refleksi penting bahwa perdamaian merupakan sebuah proses panjang.

Beberapa literatur di atas berhasil memberikan gambaran secara rinci terkait dinamika konflik Yaman, faktor penyebab hingga aktor yang terlibat konflik. Beberapa tulisan lainnya juga berhasil memberikan arahan terkait upaya maupun proses perdamaian yang sedang dijalankan seperti halnya *The 2018 UN-Led Stockholm Agreement*. Melalui studi-studi di atas dapat diketahui terdapat indikasi bahwa pihak-pihak yang terlibat konflik seperti Houthi dan aktor eksternal lain (regional dan internasional) memiliki peran dalam konteks kegagalan ataupun keterhambatan dari beberapa proses perdamaian yang pernah diupayakan di Yaman. Namun sayangnya, dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik melakukan analisis terkait proses implementasi kesepakatan Stockholm beserta tantangan yang dihadapi dari proses implementasinya terutama dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat konflik. Sehingga penelitian berikut akan

melakukan eksplorasi mendalam terkait jalannya implementasi kesepakatan Stockholm secara menyeluruh beserta faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam proses implementasi kesepakatan Stockholm di Yaman. Di mana dalam membahas tantangan atau hambatan tersebut penelitian berikut akan memfokuskan cakupan pada analisis perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam konflik maupun proses perdamaian. Dengan menggunakan pendekatan *spoiler*, tulisan ini kemudian akan mengamati motivasi hingga kepentingan yang melatarbelakangi tindakan menghambat hingga merusak kesepakatan Stockholm.

1.5 Kerangka Teori

Proses perdamaian didefinisikan sebagai sebuah inisiatif perdamaian yang lebih intensif melibatkan pihak utama dalam konflik berkepanjangan. Proses Perdamaian biasanya dianggap jauh lebih penting daripada inisiatif perdamaian yang terisolasi. Kualitas yang dihasilkan biasanya juga jauh lebih sistemik yang memungkinkannya bertahan dari beberapa tekanan. Proses perdamaian biasanya dimulai dengan pengumuman publik berupa gencatan senjata. Setelah dimulai, aturan dan urutan negosiasi selanjutnya ditentukan oleh negosiator yang berpengalaman. Sayangnya, dalam proses perdamaian sering kali dihadapkan dengan penipuan strategis dari pihak-pihak yang berkomitmen. Ancaman lain juga hadir dari rampasan, tetangga yang bermusuhan sehingga menimbulkan ancaman baru hingga kehadiran *spoiler* (Darby & Mac Ginty, 2003).

Berbicara mengenai *spoiler*, istilah ini biasanya akan muncul apabila suatu proses perdamaian atau perjanjian perdamaian runtuh. Para praktisi biasanya akan mencurigai hingga menunjuk bahwa *spoiler* adalah perusak proses perdamaian tersebut. Sebagai salah satu pengamat terkemuka mengenai konsep *spoiler*, Stephen Stedman menjelaskan bahwa *spoiler* adalah para pemimpin dan pihak yang percaya bahwa perdamaian yang muncul dari negosiasi mengancam kekuatan, pandangan dunia dan kepentingan mereka. Pihak tersebut menginginkan kekerasan untuk melemahkan upaya untuk mencapai kepentingannya. Motif *spoiler* sangat bervariasi meliputi politik, ekonomi, budaya sosial hingga keamanan. Stedman sendiri dalam penelitiannya menjelaskan bahwa proses perdamaian menciptakan *spoiler* (Stedman, 2000).

Stedman kemudian memaparkan bahwa posisi *spoiler* bisa di dalam atau di luar proses perdamaian. *Spoiler* yang berada di dalam proses perdamaian adalah pihak yang cenderung menggunakan strategi sembunyi-sembunyi. Sedangkan *spoiler* yang berada di luar proses perdamaian sering menggunakan strategi kekerasan. Dalam satu kasus kehadiran *spoiler* biasanya bisa lebih dari satu pihak. Setiap strategi yang digunakan untuk menangani satu *spoiler* memiliki implikasi untuk strategi yang digunakan untuk mengelola *spoiler* lainnya. Selanjutnya, jenis *spoiler* diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan komitmen yang ingin mereka capai. Pertama, *spoiler* kategori *limited*. Tujuan *spoiler* kategori berikut terbatas pada pembagian kekuasaan, pengakuan, ganti rugi atau pelaksanaan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi dan oposisi. *Spoiler limited* dapat dimasukkan dalam proses perdamaian jika tuntutan mereka terbatas dan apabila tidak dapat dinegosiasikan dapat diakomodasi oleh pihak lain yang berkonflik.

Kedua, *spoiler* kategori total yang mengejar kekuatan total dan pengakuan eksklusif atas otoritas. Kategori ini juga memegang preferensi yang tidak dapat diubah dan dipimpin oleh pihak-pihak yang melihat dunia dalam istilah semua atau tidak sama sekali. Mereka juga sering berdiri untuk mendukung ideologi radikal. *Total spoiler* sangat menentang perdamaian dalam bentuk kompromi atau komitmen apapun. Ketiga, *spoiler* kategori *greedy* yang posisinya berada diantara *spoiler limited* dan *spoiler total*. Pihak-pihaknya memegang tujuan yang memperluas kekuasaan atau capaian berdasarkan perhitungan biaya dan risiko. *Spoiler greedy* mungkin memiliki tujuan terbatas yang berkembang ketika dihadapkan dengan biaya dan risiko rendah; alternatifnya, ia mungkin memiliki tujuan total yang berkontraksi ketika dihadapkan dengan biaya dan risiko tinggi. *Greedy spoiler* dapat diakomodasikan dalam proses perdamaian jika tujuan terbatas mereka dipenuhi dan ada tindakan untuk membatasi mereka membuat tuntutan tambahan. Ketiga jenis spoiler di atas menimbulkan masalah yang berbeda dalam proses perdamaian. Kemudian terkait situasi apakah ada kemungkinan perubahan jenis *total spoiler* berubah menjadi *limited spoiler*, maka jawabannya sudah dipastikan tergantung lokus perilaku *spoiler*. Jika dorongan untuk perilaku *spoiler* datang dari pemimpin, maka *spoiler* dapat mengubah jenis jika pemimpinnya

berubah Akan tetapi, apabila dorongan datang dari pengikut, maka proses perubahan diyakini tidak akan terjadi.

Akan tetapi, pandangan Stedman mengenai definisi dan konsep *spoiler* tersebut mendapatkan kritik dan mengalami perkembangan dari beberapa pengamat perdamaian lainnya. Pertama, kritik hadir dari sudut pandang definisi dan ruang lingkup pihak yang dapat dinyatakan sebagai *spoiler*. Dalam hal ini, Newman dan Richmond hadir untuk menawarkan perspektif yang lebih luas mengenai pihak yang dilabeli sebagai *spoiler*. Definisi yang mereka berikan menjelaskan bahwa *spoiler* merupakan kelompok yang secara aktif berusaha untuk menghalangi, menunda atau merusak penyelesaian konflik melalui berbagai cara untuk berbagai alasan. Newman dan Richmod juga memasukkan aktor-aktor yang secara geografis berada di luar konflik tetapi memiliki kepentingan dalam mempengaruhi proses perdamaian dengan mendukung *spoiler* didalamnya. Seperti negara, sekutu politik, kelompok diaspora hingga perusahaan multinasional (Newman & Richmond, 2008, hal. 1-7). Selanjutnya, Wanis-St John berpendapat bahwa *spoiler* merupakan pihak-pihak yang dapat menentang masing-masing pihak dalam perselisihan dan mungkin memiliki kepentingan untuk mempertahankan *status quo* dalam konflik. Dalam hal ini Wanis-St John juga mengisyaratkan bahwa kelompok masyarakat sipil juga bisa dicurigai menjadi pihak yang merusak proses perdamaian.

Kedua, kritik hadir dari pandangan Stedman mengenai bahwa suatu pihak dapat dianggap sebagai *spoiler* jika mereka menggunakan kekerasan. Meskipun dalam penelitiannya Stedman kemudian mengklasifikasikan posisi *spoiler* dalam proses perdamaian dan mengatakan bahwa *spoiler* bisa saja menggunakan strategi secara diam-diam, perspektif ini dianggap menimbulkan ambiguitas oleh beberapa pakar. Zahar kemudian memberikan perspektif berbeda dengan menyatakan bahwa kekerasan hanyalah salah satu dari beberapa taktik yang digunakan oleh *spoiler* (Zahar, 2008). Kritik ini diperjelas dengan pernyataan Newton dan Richmond yang menjelaskan bahwa *spoiler* juga dapat menggunakan metode non-kekerasan untuk menghentikan atau menunda proses perdamaian. Tindakan tersebut meliputi penolakan sistematis untuk bernegosiasi atau perilaku yang memperlihatkan bahwa

pihak tersebut tidak serius untuk menjalankan komitmen kesepakatan. Newman dan Richmod kemudian melabeli pihak tersebut sebagai ‘objek yang licik’.

Penjelasan terkait konsep *spoiler* selanjutnya berkembang pada konteks apakah *spoiler* hadir untuk menentang perdamaian secara umum atau hanya terhadap perdamaian tertentu yang mereka rasa dapat mengancam eksistensi mereka. Hal ini kemudian dijawab oleh Fendius Elman yang mengatakan bahwa dalam kebanyakan kasus konflik bersenjata, hasil yang lebih disukai dari pihak yang bertikai bukanlah sekedar rekonsiliasi atas apa yang dinegosiasikan, tetapi juga penegetaan persyaratan mereka sendiri dalam kesepakatan akhir. Hal yang kemudian harus ditekankan adalah bahwa kehadiran *spoiler* tidak selalu untuk melawan perdamaian. Pihak *spoiler* bisa saja menginginkan perdamaian namun dalam bentuk lain di mana kepentingan mereka lebih terwakili.

Zahar kemudian mengklasifikasikan tujuan *spoiler* ke dalam dua kategori. Pertama, *spoiler* yang menginginkan kehancuran total dalam proses perdamaian. Hal ini terjadi ketika *spoiler* tidak menginginkan perdamaian dan menganggap akan berhasil jika proses perdamaian tersebut gagal. Kedua, *spoiler* yang ingin mengubah beberapa aspek dari perjanjian damai. Hal ini terjadi ketika *spoiler* menginginkan perdamaian, tetapi tidak puas dengan jalannya negosiasi. Mereka akan merasa berhasil jika kepentingan mereka lebih diperhatikan, diberikan ruang yang lebih banyak untuk berkontribusi dalam proses perdamaian atau bahkan dimunculkan ide-ide baru yang lebih baik untuk semua pihak. Beberapa *spoiler* juga dianggap dengan sengaja mengucilkan diri dari proses perdamaian karena mereka merasa terpinggirkan atau tidak diikutsertakan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perdamaian. Sedangkan dalam kasus yang melibatkan banyak pihak ekstrimis sangat disarankan untuk melibatkan sebanyak mungkin aktor di meja perundingan untuk mendapatkan pemahaman tentang kepentingan dan prioritas demi tercapainya perdamaian yang menguntungkan semua pihak. Zahar juga menekankan bahwa *spoiler* bisa saja tidak atau takut terhadap perdamaian karena kurangnya kepercayaan di antara mereka sendiri dan orang luar dalam proses perdamaian tersebut. Beberapa praktisi kemudian mulai menganalisa cara untuk mengatasi kehadiran *spoiler* dalam proses perdamaian.

Mulai dari taktik bujukan hingga memberikan *spoiler* apa yang diinginkannya dilakukan untuk mengubah perilaku *spoiler* dan tunduk pada norma yang telah ditetapkan. Sayangnya, cara ini seringkali kurang berhasil. Pada periode berikutnya penjaga perdamaian mulai menggunakan strategi koersif dengan melibatkan kekerasan, pihak eksternal hingga menghukum perilaku *spoiler* (Stedman, 2000).

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *spoiler* merupakan pihak-pihak yang hadir untuk mengganggu atau bahkan merusak sebuah proses perdamaian. Posisi mereka bisa saja berasal dari dalam atau luar proses perdamaian. Biasanya dalam suatu kasus, jumlah kehadiran *spoiler* bisa lebih dari satu pihak. Tujuan mereka juga bervariasi mulai dari ekonomi hingga politik. Terkadang kehadiran mereka juga didorong oleh faktor agar lebih diperhatikan dalam sebuah proses perundingan. Dalam mencapai kepentingannya tersebut, tindakan yang mereka gunakan juga tidak terbatas pada tindakan kekerasan. Akan tetapi juga dengan cara-cara *non-kekerasan* seperti mempermainkan komitmen dalam sebuah kesepakatan perdamaian.

Dalam kasus yang terjadi dalam proses perdamaian di Yaman, melalui indikator pendekatan di atas kita dapat melakukan identifikasi mendalam terkait pihak-pihak yang dapat dilabeli sebagai *spoiler*. Di mana pihak-pihak tersebut yang kemudian menjadi penghambat jalannya proses perdamaian di Yaman atau bahkan menjadi penyebab lemahnya proses implementasi UN-Led Stockholm Agreement. Apabila dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan pada bagian *literature review* dapat dilihat dalam kasus Yaman indikasi kehadiran jumlah *spoiler* tersebut lebih dari satu pihak. *Spoiler* tersebut berada di dalam dan luar proses perdamaian. Dalam hal ini Houthi dan pihak eksternal lainnya dapat diindikasikan sebagai *spoiler*. Hal ini dapat diamati dari perilaku mereka dalam rangkaian proses perdamaian. Terkait Houthi sendiri, indikasi tersebut dapat dibuktikan melalui sikap mereka mengabaikan komitmen *Stockholm Agreement*. Hal ini kemudian semakin jelas ketika misi gencatan senjata antara pemerintah Yaman dan Houthi gagal. Sedangkan mengenai pihak eksternal, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan berlebihan oleh US, Iran, Arab Saudi hingga UEA baik dalam konflik maupun proses perdamaian.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dapat diasumsikan bahwa selain fakta mengenai kurang efektifnya monitoring oleh PBB, signifikansi isi perjanjian serta dinamika campur tangan pihak luar, indikasi perilaku pihak yang dengan sengaja mengingkari dan merusak komitmen kesepakatan menjadi faktor penting lain yang menyebabkan implementasi kesepakatan Stockholm sangat terbatas atau bahkan gagal terlaksana. Kemudian, apabila melihat pada retorika proses negosiasi menuju Stockholm dan laporan pasca Stockholm berhasil disepakati, Houthi menjadi salah satu pihak yang memiliki indikasi kuat berperilaku merusak dan mengingkari komitmen kesepakatan. Dimana merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian berikut, pihak yang berperilaku diatas selanjutnya dikenal sebagai *spoiler*.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi, pemikiran seseorang secara individu atau kelompok. Melalui beberapa uraian, tujuannya adalah untuk menemukan penjelasan yang akan mengarah pada suatu kesimpulan (Hamdi, 2014, hal. 18). Dalam meneliti mengapa 2018 UN-Led Stockholm Agreement sulit untuk diimplementasikan atau bahkan gagal mencapai isi perjanjian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur. Melalui teknik ini, data penelitian diperoleh melalui literatur dalam buku, jurnal akademik, buletin online dan artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.8 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini, sistematika penulisan akan dibagi ke dalam 5 BAB, meliputi;

1. BAB 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian
2. BAB 2 akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya konflik di Yaman beserta retorika aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.
3. BAB 3 akan membahas upaya atau proses perdamaian yang pernah diterapkan di Yaman termasuk 2018 UN-Led Stockholm Agreement.
4. BAB 4 akan membahas terkait dinamika aktor yang terlibat dalam konflik Yaman untuk selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan *spoiler in peace processes*. Dengan menggunakan kerangka pemikiran *spoiler*, BAB ini juga akan memberikan jawaban terkait mengapa 2018 UN-Led Stockholm Agreement sulit atau bahkan telah gagal diimplementasikan.
5. BAB 5 sebagai bagian akhir penulis akan menyimpulkan poin penting penelitian ini secara keseluruhan.